

Keabsahan jual beli tanah atas objek yang memiliki izin menempati dari Walikota Sukabumi (studi putusan Mahkamah Agung nomor 2753 K/pdt/2013) = The validity of land transaction which contain a licence to occupy the land and house from the Mayor of Sukabumi (Judicial Review towards supreme court's decision number 2753 K/Pdt/2013)

Eka Kurniawati Rahayu, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20446035&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Kasus bermula pada tahun 1969 dengan ditempatinya rumah oleh YW atas dasar surat izin menempati rumah dari Walikota Sukabumi. Pada tahun 1974 terbit sertipikat atas nama AB dan kemudian terjadi jual beli tanah dengan RI yang menimbulkan sengketa dengan melibatkan YW hingga terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 3819 K/Pdt/1988 yang menyatakan sah jual beli dan surat izin menempati. Pada tahun 2012 para ahli waris YW mengajukan gugatan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dan berakhir dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2753 K/Pdt/2013. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana keberlakuan dari Surat Izin Menempati tersebut apabila pemegang hak izin menempati telah meninggal dunia? dan bagaimana keabsahan dari jual beli terhadap objek tanah yang terdapat izin menempati rumah dari Walikota serta status dari Sertipikat Hak Guna Bangunan 3/Cikole yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Sukabumi?. Tidak adanya aturan dan meninggalnya pemegang surat izin menempati menjadikan surat izin menempati tidak berlaku lagi dikarenakan pemberian izin bukan pemberian hak yang dapat diwariskan. Mengenai jual beli yang dilakukan adalah sah dikarenakan objek jual beli bukan lagi merupakan aset Pemda dan status SHGB adalah sah dengan telah dipenuhinya prosedur penerbitannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung dan kemudian dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan kasus dan dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan saran dan pendapat mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi. Kata Kunci : Surat Izin Menempati, Jual Beli Tanah, Penerbitan SHGB.

<hr>

Case began in 1969 with the house occupied by YW based on a license to occupy the land and house from the Mayor of Sukabumi. In 1974, published a Building Rights Certificate on behalf of AB and sold to RI which generate a dispute involving YW. The dispute of land transaction issued a Supreme Court rsquo s Decision number 3819 K Pdt 1988 which stated the validity of the transaction and the licence to occupy the house. The heirs of YW filed a lawsuit in 2012 to follow up the previous supreme court decision and its end with the supereme court decision number 2753 K Pdt 2013. The main problems in this thesis on how is the validity of the permission to occupy the house which held on the local government land if the holder of the permission has passed away and how is the authenticity of the land trading that contains a land that has a permission to occupy by the local government an how is the status of the land certificate which published by the land office . The absence of rules and the death of the holder of a license to occupies the house makes the license is no longer valid due to the granting of entitlements that can not be inherited. Regarding the purchase being made is legitimate because the object of purchase is no longer an asset to the local government and the Building Rights Certificate status is valid in the fulfillment of its issuance procedure.

This research was using juridical normative method by researching the case of a supreme court decision then arranged by positive regulation and manifested it in analytical prescriptive written which give an advice and opinion about the problem which occurred. Keywords Licence to Occupy the Land and House, Land Transaction, The Publishing of Building Rights Certificate.